

BAB 1

PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang yang mendasari penelitian mengenai tenaga kerja pertanian di wilayah Sumatra. Bab ini berisi latar belakang masalah yang menjelaskan fenomena dan urgensi topik penelitian, rumusan masalah yang merumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian secara spesifik, tujuan penelitian yang menjabarkan sasaran yang ingin dicapai, serta manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis.

1.1 Latar Belakang

Sektor pertanian merupakan pondasi utama pembangunan ekonomi suatu negara, terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia yang memiliki basis agraris yang kuat. Pertanian tidak hanya berfungsi sebagai penyedia bahan pangan, tetapi juga sebagai penyerap tenaga kerja terbesar, penghasil devisa melalui ekspor komoditas unggulan, serta motor penggerak pertumbuhan ekonomi di wilayah perdesaan. Todaro & Smith (2015) menegaskan bahwa dalam tahap awal pembangunan, sektor pertanian memegang peranan sentral karena mampu menyediakan surplus tenaga kerja, bahan baku industri, dan pasar domestik bagi produk manufaktur. Tanpa fondasi pertanian yang kokoh, proses transformasi struktural menuju industrialisasi akan berjalan timpang dan meninggalkan kelompok masyarakat pedesaan dalam kemiskinan.

Sektor pertanian memiliki peran yang penting dan strategis dalam struktur perekonomian, baik di tingkat nasional maupun regional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia, (2025) sektor pertanian masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia, yakni mencapai 28,84 persen dari total angkatan kerja nasional atau setara lebih dari 40 juta jiwa. Angka ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara agraris dengan ketergantungan tinggi terhadap sektor pertanian dalam struktur ketenagakerjaannya, yang kemudian disusul oleh sektor perdagangan dan industri pengolahan masing-masing berkontribusi sebesar 18,73 persen dan 13,86 persen terhadap penyerapan tenaga kerja nasional pada periode yang sama.

Meskipun demikian, tren penyerapan tenaga kerja di sektor ini secara nasional cenderung mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural maupun siklusal dalam perekonomian. Secara historis, transformasi struktural ekonomi Indonesia telah mendorong perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian menuju sektor industri dan jasa. Proses ini pada dasarnya mencerminkan dinamika pembangunan yang berlangsung di berbagai negara berkembang, di mana sektor pertanian secara bertahap melepas tenaga kerjanya ke sektor yang lebih produktif. Selama tahun 1989 sampai 1993, pertanian masih menyerap hingga lebih dari separuh pekerja Indonesia, namun porsinya terus berkurang pada 1994 sampai 2005 (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2025).

Namun, di Indonesia proses transformasi ini berlangsung tidak sepenuhnya lancar dan merata. Pembalikan arah terjadi ketika resesi ekonomi akibat dampak pandemi COVID-19 pada 2020, di mana banyak pekerja kembali beralih ke sektor pertanian sehingga porsinya meningkat menjadi 29,76 persen pada Agustus 2020.

Fenomena ini membuktikan bahwa sektor pertanian berfungsi sebagai katup pengaman ketenagakerjaan nasional di saat sektor industri dan jasa mengalami kontraksi. Data Badan Pusat Statistik Indonesia, (2024) menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian masih sangat signifikan, terutama di daerah-daerah dengan basis ekonomi agraris yang kuat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia (2024), kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mencapai 13,83 persen pada Triwulan II tahun 2025, menjadikannya sektor terbesar kedua setelah industri pengolahan. Secara spasial, Pulau Jawa masih mendominasi perekonomian nasional dengan kontribusi sebesar 57,04 persen terhadap PDB, diikuti oleh Pulau Sumatra sebesar 22,08 persen, Kalimantan 8,18 persen, Sulawesi 7,16 persen, Bali dan Nusa Tenggara 2,84 persen, serta Maluku dan Papua 2,70 persen.

Pada tingkat regional, Pulau Sumatra merupakan salah satu wilayah dengan basis pertanian yang sangat besar dan menjadi salah satu tulang punggung produksi pertanian nasional setelah Pulau Jawa. Pulau Sumatra mencakup sepuluh provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau. Wilayah ini dikenal sebagai penghasil utama komoditas perkebunan seperti kelapa sawit, karet, kopi, dan teh, serta hasil perikanan yang tidak hanya dikonsumsi di dalam negeri tetapi juga di ekspor ke berbagai negara. Besarnya kontribusi sektor pertanian di Pulau Sumatra menjadikan isu penyerapan tenaga kerja di sektor ini sebagai hal yang sangat relevan untuk dikaji (Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2024).

Safitri *et al.*, (2025) mengemukakan bahwa sektor pertanian berperan penting untuk mendukung ketahanan pangan dalam sistem perekonomian di Pulau

Sumatra, meskipun dihadapkan dengan tantangan perubahan iklim dan konversi lahan. Syahputri *et al.*, (2024) juga menyatakan bahwa sektor pertanian berperan signifikan dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan di negara-negara berkembang, antara lain melalui penyediaan kesempatan kerja bagi mayoritas masyarakat pedesaan yang seringkali menjadi kelompok paling rentan.

Pulau Sumatra memiliki karakteristik pertanian yang sangat beragam dan heterogen antarprovinsinya, yang dipengaruhi oleh faktor geografis, kesuburan lahan, serta kondisi ekologis masing-masing-masing wilayah. Beberapa subsektor pertanian yang tergolong sebagai sektor basis dan berpotensi tinggi di tingkat regional antara lain adalah subsektor tanaman perkebunan, kehutanan dan penebangan kayu, perikanan, serta jasa pertanian dan perburuan. Sementara itu, subsektor tanaman pangan secara umum masih tergolong sebagai sektor non-basis di tingkat Pulau Sumatra secara keseluruhan. Kondisi ini menggambarkan bahwa struktur pertanian Pulau Sumatra didominasi oleh komoditas bernilai ekspor tinggi yang bersifat padat lahan, bukan tanaman pangan subsisten (Khoirunnisa *et al.* 2024).

Subsektor perkebunan menjadi tulang punggung perekonomian pertanian di sebagian besar wilayah Sumatra. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan sektor unggulan di Provinsi Riau, khususnya pada subsektor perkebunan kelapa sawit, di mana kontribusi subsektor perkebunan terhadap perekonomian daerah Riau terus meningkat dari tahun ke tahun dengan rata-rata kontribusi subsektor perkebunan mencapai 834,24 persen terhadap nilai rata-rata PDRB sektor pertanian di Provinsi Riau. Sentra produksi kelapa sawit nasional terkonsentrasi di Pulau Sumatra, dengan Provinsi Riau sebagai kontributor utama,

disusul oleh Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Jambi. Dominasi kelapa sawit di kawasan ini tidak lepas dari keunggulan lahan gambut dan iklim tropis basah yang mendukung pertumbuhannya secara optimal (Harjanti *et al.* 2024).

Di Provinsi Jambi, subsektor perkebunan juga menjadi mata pencaharian yang paling banyak diminati oleh penduduk, dan berdasarkan analisis *Location Quotient* (LQ), komoditas yang menjadi sektor basis pada subsektor perkebunan adalah kelapa sawit dan karet, yang keduanya memiliki nilai LQ lebih dari satu, sehingga mampu memenuhi kebutuhan wilayah dan menghasilkan surplus untuk diekspor ke luar daerah. Kondisi serupa juga ditemukan di Sumatera Utara, di mana sekitar 53 persen dari seluruh rumah tangga usaha pertanian di provinsi tersebut berusaha di subsektor perkebunan, dengan komoditas unggulan berupa karet, kelapa sawit, kakao, dan tembakau (Khoirunnisa *et al.* 2024).

Subsektor kehutanan, khususnya hutan lindung dan hutan suaka alam, menjadi sektor unggulan di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Bengkulu. Sementara itu, subsektor perikanan dengan komoditas unggulan berupa perikanan laut, budidaya laut, kolam, dan sawah menonjol di Provinsi Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, dan Kepulauan Riau. Lalu, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan sektor industri pengolahan, kehutanan, maupun perikanan merupakan sektor regional primer yang paling dominan, mencerminkan bahwa basis pertanian di wilayah kepulauan ini lebih bertumpu pada sumber daya kelautan dan kehutanan dibandingkan dengan pertanian daratan (Alviansyah & Nurhayati, 2024).

Subsektor tanaman pangan dan hortikultura tetap memiliki peran penting dalam keunggulan Pulau Sumatra. Komoditas unggulan tanaman pangan meliputi

padi, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, dan ubi jalar yang tersebar di wilayah seperti Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau.

Pada subsektor hortikultura, hampir seluruh wilayah Sumatra memiliki keunggulan komparatif dengan komoditas seperti alpukat, durian, mangga, manggis, rambutan, dan pepaya, kecuali Sumatera Selatan dan Lampung. Sementara itu, Lampung menjadi pusat produksi tanaman pangan dan perkebunan, khususnya singkong, lada, dan tebu, sehingga dikenal sebagai salah satu lumbung pangan utama di Sumatra bagian selatan (Khoirunnisa *et al.* 2024).

Keberagaman subsektor unggulan di 10 provinsi Pulau Sumatra tersebut mencerminkan kompleksitas struktur ketenagakerjaan sektor pertanian di wilayah ini. Perkembangan penyerapan tenaga kerja sektor pertanian di Pulau Sumatra dalam dua dekade terakhir mencerminkan dinamika transformasi struktural yang berlangsung secara bertahap namun belum sepenuhnya tuntas. Secara relatif, proporsi tenaga kerja yang terserap di sektor pertanian menunjukkan kecenderungan menurun dari waktu ke waktu seiring dengan meningkatnya kontribusi sektor industri dan jasa dalam perekonomian regional, adanya alih fungsi lahan dan penuaan petani (Aziza *et al.* 2022).

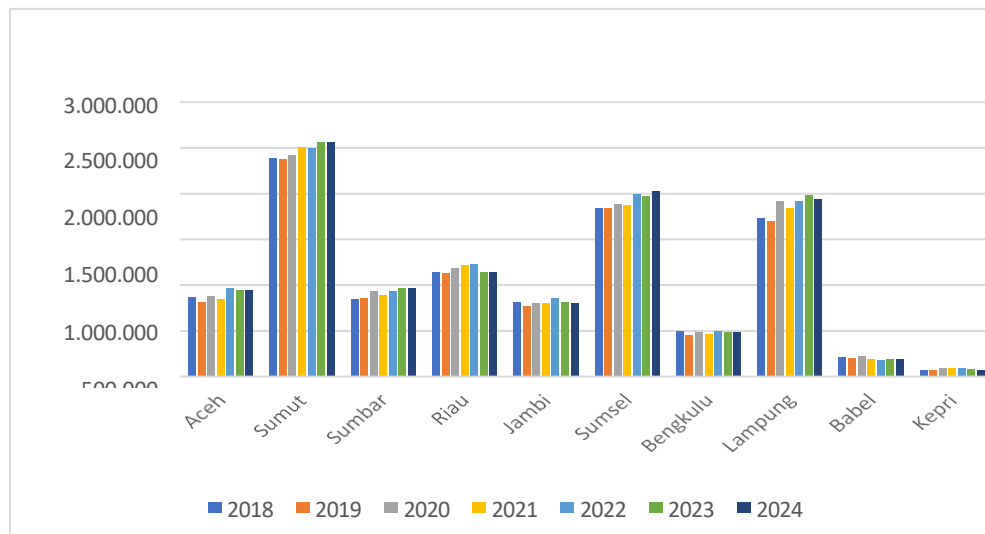
Kontribusi sektor industri dan layanan terhadap produk domestik regional Indonesia terus meningkat, sementara peranan relatif sektor pertanian cenderung mengalami penurunan, meskipun tetap signifikan dalam penyerapan tenaga kerja, dan pergantian struktur produksi ini belum sepenuhnya diiringi dengan perubahan struktur ketenagakerjaan dan peningkatan produktivitas yang optimal (Rinaldi *et al.* 2022).

Kondisi ini mengindikasikan bahwa pergeseran struktural yang terjadi lebih banyak didorong oleh perubahan sisi output ekonomi dibandingkan perubahan nyata pada struktur ketenagakerjaan itu sendiri, sehingga pertanian tetap menjadi sandaran utama angkata kerja di seluruh provinsi Pulau Sumatra meskipun produktivitasnya relatif masih rendah. Hal ini sejalan dengan data yang menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi lapangan usaha dengan daya serap kerja tertinggi dibandingkan sektor-sektor lainnya, terutama di wilayah perdesaan (Statistik Ketenagakerjaan Sektor Pertanian, 2024).

Di sisi lain, penurunan pangsa tenaga kerja pertanian di Pulau Sumatra tidak serta-merta diikuti oleh peningkatan produktivitas yang berarti melalui modernisasi dan mekanisme, melainkan lebih banyak disebabkan oleh arus migrasi generasi muda ke sektor non-pertanian dan kawasan perkotaan. Hal ini melahirkan persoalan serius berupa penuaan tenaga kerja pertanian, dimana petani masih aktif bekerja di sektor ini semakin didominasi oleh kelompok usia lanjut, sementara proses regenerasi petani muda berjalan lambat (Ariani *et al.* 2024).

Safitri *et al.* (2025) menyebutkan bahwa Pulau Sumatra dianugerahi lahan pertanian yang sangat luas, sehingga sektor ini memegang peranan yang signifikan dalam menopang struktur perekonomian kawasan tersebut. Kondisi inilah yang menjadikan pertanian sebagai pilar utama penyerapan tenaga kerja, khususnya di wilayah-wilayah yang belum memiliki infrastruktur memadai dan masih terbatasnya akses terhadap lapangan pekerjaan di luar sektor pertanian.

Berikut perkembangan jumlah tenaga kerja sektor pertanian provinsi-provinsi Pulau Sumatra periode 2018-2024.



Gambar 1.1 Tenaga Kerja Sektor Pertanian Berdasarkan Provinsi di Pulau Sumatra 2018-2024 (Jiwa)

Sumber: Badan Pusat Statistik Seluruh Provinsi di Pulau Sumatra, 2018-2024

Berdasarkan Gambar 1.1 tenaga kerja sektor pertanian di Pulau Sumatra selama periode 2018-2024 menunjukkan bahwa sektor pertanian masih memiliki peran penting dalam menyerap tenaga kerja, meskipun penyerapannya menunjukkan perbedaan antar provinsi dan mengalami dinamika dari waktu ke waktu. Secara umum, penyerapan tenaga kerja sektor pertanian di Pulau Sumatra menunjukkan pola fluktuatif dengan kecenderungan meningkat sepanjang periode pengamatan. Beberapa provinsi, seperti Aceh dan Sumatra Barat mengalami peningkatan jumlah tenaga kerja pertanian meskipun terdapat penurunan pada tahun-tahun tertentu. Sementara itu, provinsi Riau dan Jambi menunjukkan fluktuasi yang relatif stabil, sedangkan Bengkulu dan Kepulauan Bangka Belitung cenderung stagnan dengan jumlah tenaga kerja yang lebih kecil (BPS Provinsi Aceh, 2023), (BPS Provinsi Sumatra Barat, 2024; BPS Provinsi Riau, 2024; BPS Provinsi Jambi, 2024).

Provinsi Sumatra Utara, Sumatra Selatan dan Lampung memiliki tingkat penyerapan tenaga kerja sektor pertanian yang relatif lebih tinggi dibandingkan provinsi lainnya. Sumatra Utara sebagai provinsi dengan jumlah tenaga kerja pertanian terbesar, mencatat peningkatan dari 2,55 juta jiwa pada 2023 menjadi 2,56 juta jiwa pada 2024. Kepulauan Riau dan Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan tingkat penyerapan tenaga kerja paling rendah. Kepulauan Riau mengalami penurunan dari 85.171 jiwa pada 2023 menjadi 74.325 jiwa pada 2024 (BPS Provinsi Aceh, 2023), (BPS Provinsi Sumatra Utara, 2024), (BPS Provinsi Sumatra Barat, 2024), (BPS Provinsi Riau, 2024), (BPS Provinsi Jambi, 2024) (BPS Provinsi Sumatra Selatan, 2024), (BPS Provinsi Bengkulu, 2024), (BPS Provinsi Lampung, 2024), (BPS Provinsi Kep. Bangka Belitung, 2024), (BPS Provinsi Kep. Riau, 2024).

Tingginya penyerapan tenaga kerja pertanian di Sumatera Utara disebabkan oleh jumlah penduduk terbesar di Pulau Sumatra sehingga secara alamiah memiliki jumlah angkatan kerja yang jauh lebih besar dibandingkan provinsi lainnya, dan sebagian besar dari angkatan kerja tersebut terserap di sektor pertanian sebagai lapangan usaha yang paling mudah diakses terutama oleh masyarakat yang tingkat pendidikannya relatif masih rendah (Statistik Ketenagakerjaan Sektor Pertanian, 2024).

Provinsi ini juga memiliki hamparan lahan perkebunan yang sangat luas dengan komoditas unggulan seperti karet kopi dan kakao yang bersifat padat karya, sehingga kebutuhan tenaga kerja di sektor ini bersifat besar dan berkelanjutan mulai dari tahap produksi hingga distribusi. Selain itu, tingginya arus investasi pertanian terutama penanaman modal asing pada subsektor perkebunan akan mendorong

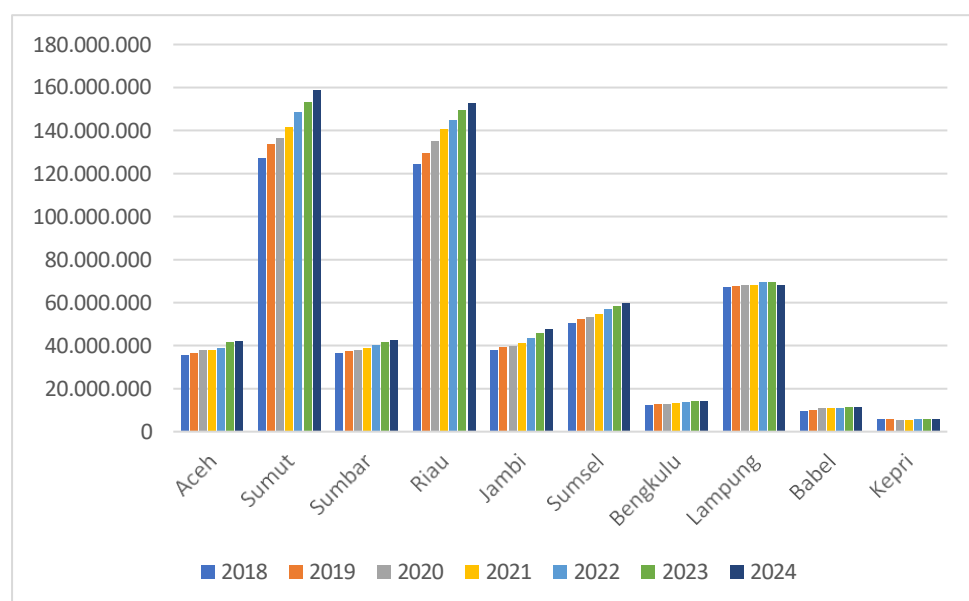
ekspansi lahan dan peningkatan kapasitas produksi yang secara langsung akan memperluas permintaan terhadap tenaga kerja pertanian (Hasibuan *et al.* 2019). Kepulauan Riau tercatat sebagai provinsi paling rendah penyerapan tenaga kerja sektor pertanian, yang disebabkan oleh dominasi sektor pariwisata kelautan dan produktivitas lahan yang terbatas akibat kondisi kepulauan. Perbedaan ini juga mencerminkan adanya variasi struktur ekonomi dan kapasitas sektor pertanian di masing-masing daerah (Suri, 2020).

Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan bahwa sektor pertanian masih berperan penting sebagai penyerap tenaga kerja di sebagian besar provinsi di Sumatra, meskipun setiap daerah memiliki karakteristik dan dinamika penyerapan tenaga kerja yang berbeda-beda. Kondisi fluktuasi dan perbedaan tingkat penyerapan tenaga kerja antarprovinsi tersebut mengindikasikan bahwa penyerapan tenaga kerja sektor pertanian tidak hanya dipengaruhi oleh potensi sumber daya alam, tetapi juga oleh berbagai faktor ekonomi lainnya, seperti pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) pertanian, investasi di sektor pertanian, serta aktivitas perdagangan khususnya ekspor hasil pertanian. Pola fluktuasi penyerapan tenaga kerja pertanian di Pulau Sumatra juga menunjukkan adanya fenomena ketidakseimbangan pertumbuhan, dimana beberapa provinsi justru mengalami penurunan tenaga kerja pertanian pada saat yang bersamaan dengan meningkatnya nilai output pertanian (Tamala *et al.* 2023).

Produk domestik regional bruto pertanian merupakan salah satu indikator utama yang mencerminkan besaran output ekonomi yang dihasilkan oleh sektor pertanian di suatu wilayah. Ketika produk domestik regional bruto pertanian meningkat, aktivitas produksi di sektor pertanian semakin berkembang, yang pada

gilirannya membutuhkan lebih banyak tenaga kerja untuk menggerakkan proses produksi tersebut. Dengan kata lain, pertumbuhan produk domestik regional bruto pertanian diharapkan mampu mendorong peningkatan permintaan terhadap tenaga kerja di sektor ini. Hubungan ini sejalan dengan konsep *derived demand* yang dikemukakan oleh Marshall (dalam Novianti & Widawati, 2025), yang menyatakan bahwa permintaan tenaga kerja merupakan permintaan turunan dari permintaan terhadap output yang dihasilkan.

Berikut merupakan perkembangan produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan 2010 sektor pertanian provinsi-provinsi Pulau Sumatra periode 2018-2024.



Gambar 1.2. PDRB ADHK Sektor Pertanian Berdasarkan Provinsi di Pulau Sumatra 2018-2024 (Juta Rupiah)

Sumber: Badan Pusat Statistik Seluruh Provinsi di Pulau Sumatra, 2018-2024

Berdasarkan Gambar 1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian di provinsi-provinsi Pulau Sumatra selama periode 2018-2024, terlihat bahwa nilai PDRB sektor pertanian menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan

antarprovinsi. Provinsi Sumatra Utara dan Riau tercatat sebagai daerah dengan nilai PDRB sektor pertanian terbesar di Pulau Sumatra, yang pada tahun 2024 masing-masing telah melampaui angka 120 triliun rupiah. Sumatra Utara bahkan mencatatkan nilai PDRB mendekati 160 triliun rupiah, mencerminkan besarnya kapasitas produksi sektor pertanian di wilayah tersebut (BPS Provinsi Sumatra Utara, 2024; BPS Provinsi Riau, 2024).

Kedua provinsi ini juga menunjukkan kecenderungan peningkatan PDRB yang relatif konsisten sejak 2018 hingga 2024, yang mengindikasikan perkembangan sektor pertanian yang cukup positif. Sementara itu, provinsi Lampung berada pada posisi berikutnya dengan nilai PDRB sekitar 70 triliun rupiah pada tahun 2024 dan mengalami pertumbuhan yang stabil dari tahun ke tahun. Di sisi lain, provinsi Sumatra Barat dan Jambi memiliki nilai PDRB sektor pertanian tingkat menengah, yakni berkisar antara 40 hingga 60 triliun rupiah (BPS Provinsi Lampung, 2024), (BPS Provinsi Sumatra Barat, 2024), (BPS Provinsi Jambi, 2024).

Provinsi Aceh, Bengkulu, dan Sumatra Selatan menunjukkan nilai PDRB yang relatif lebih rendah, meskipun tetap mengalami pertumbuhan sepanjang periode pengamatan. Provinsi Kepulauan Riau dan Kepulauan Bangka Belitung mencatatkan nilai PDRB sektor pertanian paling kecil, yaitu dibawah 10 triliun rupiah, yang kemungkinan berkaitan dengan karakteristik wilayah kepulauan serta struktur perekonomian yang lebih berorientasi pada sektor non-pertanian (BPS Provinsi Aceh, 2024a), (BPS Provinsi Bengkulu, 2024), (BPS Provinsi Sumatra Selatan, 2024).

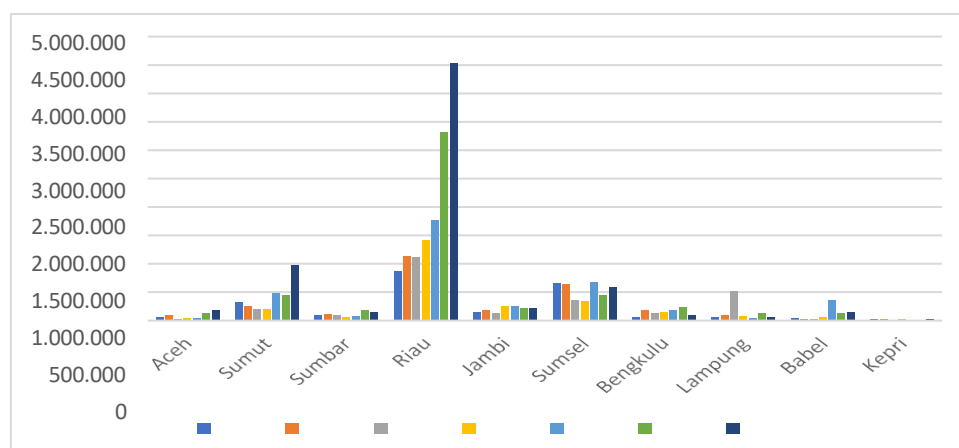
PDRB sektor pertanian mencerminkan total nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi pertanian di suatu wilayah dalam periode tertentu. Peningkatan PDRB sektor pertanian mengindikasikan terjadinya ekspansi output yang pada gilirannya membutuhkan tambahan input tenaga kerja guna mempertahankan ataupun meningkatkan kapasitas produksi. Mekanisme ini sejalan dengan konsep *derived demand* (permintaan turunan) dalam teori ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa permintaan terhadap tenaga kerja merupakan turunan langsung dari permintaan terhadap output yang dihasilkan (Ramadani & Iskandar, 2024).

Pertumbuhan nilai tambah sektor pertanian secara teori berkorelasi positif terhadap peningkatan tenaga kerja di sektor tersebut. Namun demikian, hubungan antara PDRB pertanian dan penyerapan tenaga kerja tidak bersifat linear secara mutlak. Apabila pertumbuhan PDRB lebih banyak didorong oleh adopsi teknologi pertanian modern dan mekanisme produksi, maka jumlah tenaga kerja yang terserap dapat bersifat stagnan atau bahkan mengalami penurunan meskipun nilai output pertanian terus meningkat. Fenomena ini dijelaskan oleh konsep perubahan teknologi yang bersifat *labor-saving* oleh Hayami & Ruttan (dalam Hasibuan *et al.* 2019).

Perbedaan nilai PDRB sektor pertanian yang cukup mencolok antar provinsi di Pulau Sumatra tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian. Tingginya nilai PDRB tidak serta merta diikuti oleh tingginya penyerapan tenaga kerja, mengingat adanya faktor lain seperti produktivitas tenaga kerja, luas lahan, jenis komoditas yang diusahakan (Melati & Idris, 2023).

Selain PDRB sektor pertanian, investasi juga diidentifikasi sebagai faktor yang berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pertanian. Harrod-Domar (dalam Rezky *et al.* 2023) menjelaskan bahwa investasi memiliki dua efek simultan dalam perekonomian, yakni efek permintaan melalui *multiplier effect* yang meningkatkan pendapatan, dan efek penawaran melalui perluasan kapasitas produksi yang secara langsung menciptakan lapangan kerja baru. Dalam konteks sektor pertanian, kedua efek tersebut berarti bahwa setiap tambahan investasi di sektor pertanian tidak hanya meningkatkan output pertanian, tetapi juga memperluas kesempatan kerja bagi tenaga kerja di sektor tersebut. Penelitian Adha & Andiny, (2022) yang menganalisis faktor-faktor penyerapan tenaga kerja sektor pertanian di Indonesia menemukan bahwa investasi di sektor pertanian, baik yang bersumber dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), berpengaruh positif terhadap jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor tersebut.

Berikut merupakan perkembangan investasi sektor pertanian provinsi-provinsi Pulau Sumatra periode 2018-2024.



Gambar 1.3 Investasi Sektor Pertanian Berdasarkan Provinsi di Pulau Sumatra 2018-2024 (Juta Rupiah)

Sumber: Kementerian Investasi dan Hirilisasi/BKPM, 2024

Berdasarkan Gambar 1.3 investasi sektor pertanian di Pulau Sumatra periode 2018-2024 menunjukkan perkembangan yang bervariasi antarprovinsi dan cenderung menunjukkan peningkatan investasi di beberapa wilayah utama. Provinsi Riau menunjukkan nilai investasi sektor pertanian tertinggi dibandingkan provinsi lain, dengan tren peningkatan yang sangat signifikan terutama sejak tahun 2021 hingga 2024 yang mencapai 45 triliun rupiah. Kondisi ini mengindikasikan adanya ekspansi sektor pertanian yang masif, khususnya pada subsektor perkebunan dan industri pengolahan hasil pertanian. Tingginya investasi tersebut berimplikasi pada meningkatnya permintaan tenaga kerja, baik tenaga kerja langsung pada kegiatan budidaya maupun tenaga kerja tidak langsung pada sektor hilir, sehingga berpotensi meningkatkan penyerapan tenaga kerja di wilayah tersebut (Zahra *et al.* 2025).

Sementara itu, Sumatra Utara menunjukkan peningkatan dari tahun 2023 hingga 2024, yaitu dari 4,5 triliun rupiah menjadi 9,7 triliun rupiah. Sumatra Selatan walaupun mengalami penurunan di tahun 2023, namun kembali mengalami peningkatan di 2024 yaitu dari 4,4 triliun rupiah menjadi 5,9 triliun rupiah. Stabilitas investasi di kedua provinsi ini mencerminkan keberlanjutan aktivitas sektor pertanian yang didukung oleh ketersediaan infrastruktur, luas lahan pertanian, serta akses pasar yang memadai. Jambi menunjukkan nilai investasi yang stagnan cenderung menurun. Seperti pada tahun 2024 yaitu dari 814 juta rupiah menjadi 805 juta rupiah (Kementerian Investasi dan Hirilisasi, 2024).

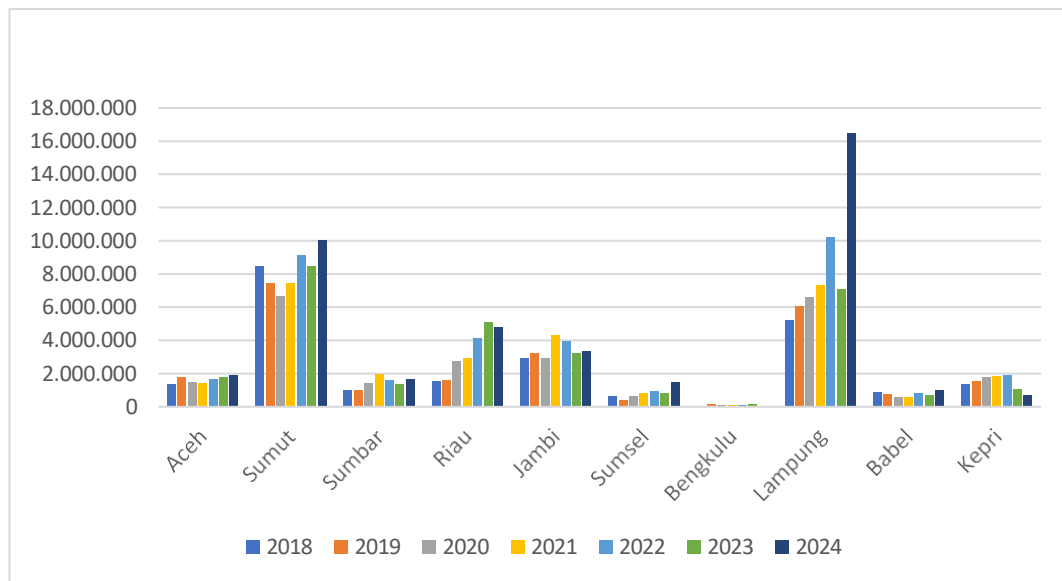
Sebaliknya, provinsi-provinsi seperti Aceh, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, dan Lampung menunjukkan nilai investasi sektor pertanian yang relatif rendah dan fluktuatif. Meskipun pada tahun 2020 Lampung mencatatkan investasi paling tinggi hingga 5,1 triliun rupiah, namun pada tahun

berikutnya kembali mengalami penurunan hingga 734 miliar rupiah. Rendahnya investasi mengindikasikan terbatasnya ekspansi sektor pertanian, yang berpotensi menghambat penciptaan lapangan kerja baru. Faktor keterbatasan modal, skala usaha pertanian kecil, serta rendahnya minat investasi swasta diduga menjadi penyebab utama rendahnya investasi, yang akhirnya berdampak pada rendahnya penyerapan tenaga kerja sektor pertanian di wilayah tersebut (Hasibuan *et al.* 2019).

Investasi pertanian memiliki hubungan dua arah dengan penyerapan tenaga kerja. Di satu sisi, investasi yang fokus pada perluasan skala usaha pertanian (*extensive invesment*) akan memperluas kapasitas produksi sehingga mendorong permintaan tenaga kerja. Di sisi lain, investasi yang fokus pad modernisasi dan mekasnisme pertanian (*intensive/ capital deepening invesment*) justru berpotensi menggantikan tenaga kerja dengan mesin sehingga dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja dapat negatif (Erlina & Iskandar, 2023).

Ekspor komoditas pertanian mencerminkan kemampuan sektor pertanian suatu wilayah dalam bersaing di pasar internasional, sekaligus menjadi pendorong peningkatan produksi yang berujung pada kebutuhan tenga kerja yang lebih besar. Pulau Sumatra memiliki keunggulan komparatif dalam ekspor komoditas pertanian, khususnya minyak kelapa sawit, karet dan kopi (Kementerian Perdagangan RI, 2023). Nilai ekspor sektor pertanian merupakan salah satu indikator penting yang mencerminkan kinerja sektor pertanian, di mana peningkatan ekspor berpotensi mendorong peningkatan produksi dan pada akhirnya meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Berikut perkembangan ekspor sektor pertanian di provinsi-provinsi di Pulau Sumatra periode 2018-2024.



Gambar 1.4 Ekspor Sektor Pertanian Berdasarkan Provinsi di Pulau Sumatra 2018-2024 (Juta Rupiah)

Sumber: Badan Pusat Statistik Seluruh Provinsi di Pulau Sumatra, 2018-2024

Berdasarkan Gambar 1.4 ekspor sektor pertanian di Pulau Sumatra selama periode 2018-2024 menunjukkan dinamika yang bervariasi antarprovinsi dan cenderung mengalami peningkatan pada beberapa daerah. Provinsi Lampung dan Sumatra Utara merupakan daerah dengan nilai ekspor sektor pertanian tertinggi di Pulau Sumatra. Pada tahun 2023 nilai ekspor pertanian Lampung tercatat sekitar 7 triliun rupiah, kemudian meningkat secara signifikan hingga mencapai sekitar 16,5 triliun rupiah pada tahun 2024. Peningkatan yang tajam ini menunjukkan adanya ekspansi produksi dan permintaan pasar internasional terhadap komoditas unggulan seperti kopi, lada dan hasil perkebunan lainnya. Kondisi ini berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan tenaga kerja, terutama pada kegiatan produksi, pengolahan, dan distribusi hasil pertanian

Stabilitas dan peningkatan ekspor ini mencerminkan keberlanjutan aktivitas pertanian dan perkebunan skala besar, yang berperan penting dalam mempertahankan tingkat penyerapan tenaga kerja sektor pertanian di provinsi

tersebut. Provinsi Riau dan Jambi menunjukkan tren peningkatan ekspor yang cukup signifikan meskipun dengan nilai yang lebih rendah dan mengalami fluktuasi dibandingkan Lampung dan Sumatra Utara (BPS Provinsi Riau, 2024; BPS Provinsi Aceh, 2024; BPS Provinsi Jambi, 2024).

Provinsi-provinsi seperti Aceh, Sumatra Selatan, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau menunjukkan nilai ekspor sektor pertanian yang relatif rendah dan cenderung berfluktuasi. Hal ini terlihat di nilai ekspor pertanian Aceh berada pada kisaran 1,2 sampai 1,9 triliun rupiah, sementara Bengkulu mencatat nilai ekspor terendah, yaitu dibawah 1 triliun rupiah selama periode pengamatan. Rendahnya nilai ekspor di provinsi-provinsi tersebut mengindikasikan terbatasnya skala produksi dan akses pasar internasional, yang berdampak pada terbatasnya kemampuan sektor pertanian dalam menciptakan lapangan kerja.

Ekspor pertanian memiliki jalur transmisi yang jelas terhadap penyerapan tenaga kerja. Ketika permintaan ekspor komoditas pertanian meningkat akan mendorong produsen pertanian untuk memperluas kapasitas produksi guna memenuhi pesanan pasar internasional, sehingga kebutuhan tenaga kerja ikut meningkat. Mekanisme ini bekerja melalui efek multiplier perdagangan internasional yang dikenal dalam teori *export-led growth* (Pandia *et al.* 2025).

Dinamika penyerapan tenaga kerja sektor pertanian di Pulau Sumatra menghadapi beberapa permasalahan mendasar yang memerlukan kajian empiris mendalam. Pertama, terdapat ketimpangan yang signifikan dalam penyerapan tenaga kerja antar provinsi di Pulau Sumatra, dimana beberapa provinsi mengalami pertumbuhan output pertanian yang tidak diikuti dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja.

Data menunjukkan bahwa meskipun PDRB sektor pertanian Riau meningkat dari 149 triliun rupiah pada tahun 2023 menjadi 152,69 triliun rupiah pada tahun 2024, tenaga kerja pertanian justru mengalami stagnasi bahkan cenderung menurun dari 1,146 juta jiwa menjadi 1,142 juta jiwa. Fenomena ini menunjukkan tidak terjadinya peningkatan produktivitas perkapita atau substitusi tenaga kerja dengan modal dalam proses produksi pertanian.

Kedua, investasi sektor pertanian yang mengalami peningkatan substansial tidak selalu berkorelasi positif dengan penyerapan tenaga kerja. Provinsi Riau mencatat lonjakan investasi pertanian dari 33,25 miliar rupiah pada tahun 2023 menjadi 45,31 miliar rupiah pada tahun 2024, namun penyerapan tenaga kerja pertaniannya relatif stabil. Ketiga, peningkatan nilai ekspor pertanian juga tidak serta merta meningkatkan penyerapan tenaga kerja pertanian. Provinsi Lampung yang mengalami peningkatan nilai ekspor paling tinggi dari 7 triliun rupiah pada 2023 menjadi 16,4 triliun rupiah pada 2024. Namun, jumlah tenaga kerja pertaniannya menurun dari 1,98 juta jiwa pada 2023 menjadi 1,94 juta jiwa pada 2024 (Anggreani *et al.* 2023).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa PDRB sektor pertanian berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pertanian. Pengaruh investasi pertanian tidak konsisten, namun banyak temuan yang negatif, dan ekspor pertanian tidak konsisten namun berbagai studi menunjukkan hasil berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pertanian.

Berbagai penelitian telah mengkaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja sektor pertanian. Adapun beberapa

penelitian luar negeri yang meneliti topik ini misalnya, penelitian Sansika *et al.* (2023) menemukan bahwa ekspor bahan mentah pertanian pada 101 negara berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja pertanian. Robale *et al.* (2024) menemukan bahwa peningkatan ekspor pertanian di Filipina mendorong perluasan penyerapan tenaga kerja pertanian. Penelitian Mizik *et al.* (2025) menemukan bahwa penggunaan teknologi khususnya mesin dalam produksi pertanian berperan penting dalam meningkatkan produktivitas namun berpotensi mengurangi kebutuhan tenaga kerja di negara berkembang. Penelitian Abdelgawwad *et al.* (2023) menemukan bahwa dalam jangka panjang peningkatan investasi pada sektor pertanian di Mesir akan meningkatkan PDB sektor pertaniannya yang mendorong pertumbuhan sektor pertanian untuk perluasan penyerapan tenaga kerja.

Beberapa penelitian dalam negeri misalnya penelitian oleh Pratama & Hidayah, (2023), menganalisis determinan penyerapan tenaga kerja sektor pertanian di Provinsi Jawa Tengah periode 2010-2021 dengan pendekatan data panel. Penelitian tersebut menemukan bahwa PDRB sektor pertanian dan tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Namun, penelitian ini terbatas pada satu provinsi di Pulau Jawa dan tidak memasukkan variabel ekspor yang krusial dalam era ekonomi terbuka.

Penelitian yang dilakukan oleh Tamala *et al.* (2023) di Kabupaten Muaro Jambi menunjukkan bahwa PDRB sektor pertanian, luas lahan pertanian, dan investasi pertanian berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pertanian.

Suri, (2020) juga menemukan bahwa PDRB sektor pertanian berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Riau. Br. Manurung, (2020) melakukan penelitian di Sulawesi Tengah menemukan PDRB pertanian berpengaruh positif. Sakdiyah & Taufiq, (2023) juga menemukan hal yang sama bahwa PDRB sektor pertanian berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pertanian di Kabupaten Lamongan.

Penelitian yang dilakukan oleh Erlina & Iskandar, (2023) di Indonesia menemukan bahwa investasi berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pertanian. Octaviani & Juliprijanto, (2021) menemukan bahwa PDRB pertanian berpengaruh signifikan namun investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pertanian di Jawa Tengah. Zahra *et al.* (2025) menemukan bahwa investasi langsung dalam negeri berpengaruh positif dan signifikan, namun investasi asing tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan di Riau. Belmondo & Triani, (2020) menemukan bahwa investasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pertanian di Indonesia. Adha & Andiny, (2022) menemukan investasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan di Indonesia. Muzzlena & Siregar, (2020) menemukan bahwa ekspor komoditas unggulan berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja pertanian di Kalimantan Selatan.

Penelitian mengenai determinan penyerapan tenaga kerja sektor pertanian telah banyak dilakukan baik internasional maupun nasional. Beberapa penelitian internasional dilakukan pada tingkat negara atau lintas negara dengan menggunakan metode data panel dan regresi *Ordinarily Least Squares* (OLS) dengan data *time series*. Penelitian yang dilakukan di Indonesia sebagian besar pada

lingkup wilayah kabupaten, provinsi atau secara nasional sehingga dinamika struktural antarprovinsi dalam satu pulau yang memiliki karakteristik pertanian serumpun belum banyak dikaji dalam literatur. Padahal, Indonesia sebagai negara kepulauan besar di dunia memiliki heterogenitas dan ketimpangan ekonomi yang sangat tinggi antarwilayah, sehingga analisis berskala nasional cenderung tidak mampu menangkap pola spesifik yang terjadi di tingkat pulau. Apalagi, hampir seluruh provinsi di Pulau Sumatra menjadikan sektor pertanian sebagai penyerap tenaga kerja utama.

Dari aspek variabel, penelitian-penelitian terdahulu di Indonesia seperti Pratama & Hidayah (2023), Novianti & Widawati (2025), dan Sakdiyah & Taufiq (2023) tidak memasukkan variabel ekspor pertanian sebagai determinan penyerapan tenaga kerja, meskipun Pulau Sumatra merupakan wilayah dengan orientasi ekspor komoditas pertanian yang tinggi.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh simultan PDRB pertanian, investasi pertanian, dan ekspor pertanian terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pertanian di Pulau Sumatra menggunakan data panel dengan 10 provinsi di Pulau Sumatra periode 2018-2024. Penelitian ini bertujuan mengisi kesenjangan literatur dengan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja sektor pertanian Pulau Sumatra. Cakupan wilayah yang lebih luas yaitu 10 provinsi di Pulau Sumatra memungkinkan analisis komparatif antarprovinsi dan identifikasi pola umum serta spesifik yang dapat menjadi dasar perumusan kebijakan regional yang lebih efektif.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaruh produk domestik regional bruto pertanian terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pertanian di Pulau Sumatra?
2. Bagaimana pengaruh investasi pertanian terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pertanian di Pulau Sumatra?
3. Bagaimana pengaruh ekspor pertanian terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pertanian di pulau Sumatra?
4. Bagaimana pengaruh produk domestik regional bruto pertanian, investasi pertanian dan ekspor pertanian terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pertanian di Pulau Sumatra?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui pengaruh produk domestik regional bruto pertanian terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pertanian di Pulau Sumatra.
2. Mengetahui pengaruh investasi pertanian terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pertanian di Pulau Sumatra.
3. Mengetahui pengaruh ekspor pertanian terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pertanian di Pulau Sumatra.

4. Mengetahui pengaruh produk domestik regional bruto pertanian, investasi pertanian dan ekspor pertanian terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pertanian di Pulau Sumatra.

1.4 Manfaat Penelitian

Suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut.

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur ekonomi pembangunan, khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja sektor pertanian.
2. Dapat menjadi referensi dan dasar bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja sektor pertanian.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini bisa menjadi landasan bagi para peneliti lain yang sejenis dalam rangka meningkatkan kemampuan memecahkan masalah yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja sektor pertanian. Hasil penelitian ini secara praktis juga diharapkan dapat menjadi ilmu pengetahuan tambahan dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja khusus sektor pertanian.

2. Bagi pemerintah penelitian ini memberikan informasi berbasis data kepada perencana kebijakan provinsi atau daerah di Sumatra mengenai variabel sektoral mana (PDRB, investasi, ekspor) yang lebih efektif mendorong penyerapan tenaga kerja sektor pertanian. Penelitian ini diharapkan juga dapat dijadikan masukan untuk merencanakan dan membuat regulasi terutama pada bidang pertanian sehingga dapat membantu peningkatan pertumbuhan ekonomi petani.